



# RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.8 Kab. Sidrap  
**SULAWESI SELATAN**

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR :           TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang :

- Menimbang       : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- Mengingat       : 1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal, Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

NIP. 19651231 198711 1 013

Tembusan :

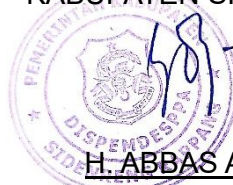
1. Bupati Siderneng Rappang sebagai lapioran;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal Juli 2025.

**Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	H. ABBAS ARAS, SP., M.AP	Pengarah
2	FARADILLA BAKRY, SKM., M.Si	Ketua
3	ANDI MULIYA RAHMA, S.Sos	Sekretaris
4	SUNANDAR, SE., M.AP	Anggota
5	Hj. SYAHRIYANI, SE., M.AP	Anggota
6	ALFIA, S.IP	Anggota
7	ANDI DIANA SAID ROEM, S.KM	Anggota
8	MASFA INDRID DJAMAL, S.IP., M.Adm.Pem	Anggota Tim Sekretaris

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP  
NIP. 196512311987111013

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan agenda dan kebijakan pembangunan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, September 2025  
KEPALA DINAS PEMDESPPA KABUPATEN  
SIDERNENG RAPPANG,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651231 198711 1 013



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, local, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan system manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah  $\pm 1.935$  km<sup>2</sup>, terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan Ajatappareng. Perkembangan pembangunan desa menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya jumlah desa mandiri dari 17,65% pada tahun 2020 menjadi 48,53% pada tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat desa yang berstatus berkembang dan tertinggal, serta kelembagaan desa melalui BUMDes belum seluruhnya efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi.



Selain itu, permasalahan sosial seperti kemiskinan di perdesaan, ketimpangan kesejahteraan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, hingga isu stunting, masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara serius. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan yang holistik dan terintegrasi antara pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Secara umum, OPD ini berperan dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025–2029 adalah: **“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera.”** Visi ini dijabarkan dalam misi pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis desa dan potensi lokal.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini didasari pada kondisi daerah yang masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan BUMDes, serta perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Secara definisi, **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)** adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahunnya.

Renstra DPMD-PPA disusun berdasarkan amanat regulasi, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

Nilai strategis Renstra Perangkat Daerah ini adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten dengan pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar dalam mengintegrasikan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa dengan agenda pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, sehingga mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengatur kedudukan, peran, fungsi, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta lembaga adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 jo. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang menjadi pedoman teknis pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan usaha ekonomi desa;
16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang salah satunya diarahkan pada pembangunan SDA, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan usaha produktif.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah, pedoman, dan kerangka kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ke dalam program dan kegiatan yang relevan dengan



tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta dasar pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan, dan perlindungan anak dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan renja untuk menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Menyediakan instrumen perencanaan yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja perangkat daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil pembangunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. Isu Strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;



3.2 Strategis dan Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PMDPPA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa dan masyarakat dalam pembangunan, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel, serta menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pengarusutamaan gender.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan layanan fasilitasi dan pendampingan pembentukan dan penguatan kelembagaan desa, pelatihan aparatur desa, pelaksanaan musyawarah desa, serta pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di bidang pemberdayaan masyarakat, dinas ini mengembangkan potensi dan partisipasi masyarakat melalui program-program peningkatan kapasitas ekonomi, sosial dan budaya berbasis lokal.

Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelayanan difokuskan pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesetaraan gender, pembinaan organisasi perempuan, serta penyelenggaraan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. DPMDPPA juga menjadi penggerak dalam koordinasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, berkeadilan, inklusif, responsif gender, dan berbasis data, guna mendukung pencapaian visi daerah ***“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”***.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

**1) Tugas**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah



diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

## **2) Fungsi**

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

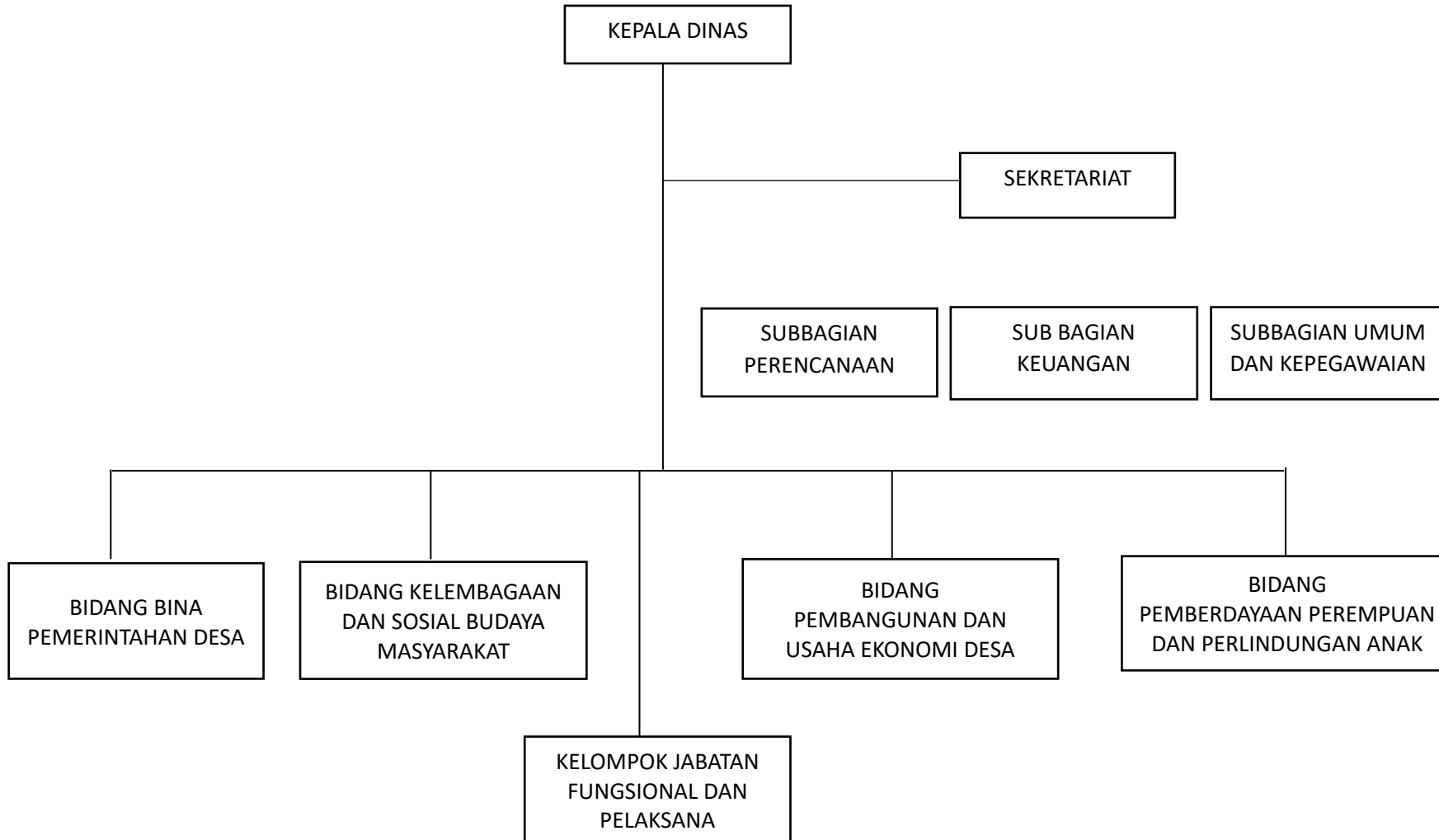
## **3) Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 1 Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang Teknis Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (PSK). Adapun lingkup Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**b. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang**

Didalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

**1) Komposisi Pegawai**

Jumlah pegawai pada Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 27 orang. Dari jumlah tersebut 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian serta 11 (sebelas) orang Jabatan Fungsional, Adapun jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 7 (tujuh) orang.

Berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari Master (S2) sebanyak 10 orang, Sarjana (S1) 16 orang dan SMA sebanyak 1 orang.

Komposisi Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan dan kualifikasi Pendidikan dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan**

No	Uraian	Dinas PMDPPA (orang)	Pendidikan	Jenis Kelamin	
				L	P
1	Eselon II	1	S2 = 1	1	-
2	Eselon III	5	S2 = 3 S1 = 2	1	4
3	Eselon IV	3	S2 = 1 S1 = 2	-	3
4	Jabatan Fungsional	11	S2 = 3 S1 = 8	3	8
5	Fungsional Umum (staf)	7	S2 = 2 S1 = 4 SMA = 1	2	5

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMDPPA Kab. Sidrap Tahun 2025



## 2) Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Sarana dan Prasarana yakni bangunan/Gedung kantor dan kendaraan dinas sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	a. Gedung Kantor I	1	Ditempati oleh pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditempati oleh Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Gedung Kantor II	1	
2	a. Mobil	4	Operasional Kepala Dinas dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Fungsional/Staf
	b. Motor	10	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMDPPA Kab. Sidrap Tahun 2025

Selain dari sarana dan prasarana tersebut di atas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung oleh peralatan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, komputer, laptop dan printer.

### c. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1.3  
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	35	35	35	35	68.85
2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	%	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	33.8	33.8	33.8	33.1	33.3
4.	Rasio KDRT	%	0.027	0.027	0.021	0.0027	0.0021
5.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100
6.	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
7.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	0	0	0	0	0
8.	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang	%	100	100	100	100	100



	Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum						
10.	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
11.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
12.	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian	%	15	15	15	15	15
13.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	100	100	100	100
14.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	19	17	13	8	13
15.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
16.	Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	0	0
17.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
18.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
19.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	0	0	0	0	0

Capaian target indikator tujuan Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (TPB/SDG's) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.4  
Capaian Target Indikator TPB/SDG's Tahun 2020-2024

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
1.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Desa	1	1	1	1	0
2.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Desa	3	2	0	1	1
3.	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Desa	4	12	20	30	33
4.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di	Poin	0.429	0.478	0.5166	0.5167	0.5167



		daerah tertinggal						
No	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
5.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	0	0	0	0.004	0.004
6.	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0	0	0	0.04	0.04
7.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	0	0	0	4	4
8.	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
9.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	10	10	10	10	4.87
<b>PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)</b>				<b>Capaian</b>				



No	No. Indi	Indikator	Satuan	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
10.		Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan Perempuan	Jumlah	32	32	33	34	34
11.	5.2.1*	Proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kasus	3	2	4	2	2
12.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Kasus	0	0	3	2	2
13.	5.2.2*	Proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kasus	2	4	3	2	2
14.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100
15.	5.3.1*	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang beerstatus kawin atau	Orang	46	50	125	623	623



		berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun						
16.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Kursi	4	4	4	4	4
17.	5.5.2*	Proporsi Perempuan yang berada di posisi managerial	Orang	11	11	13	13	2
18.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat Keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan Kesehatan reproduksi	Orang	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut :

### 1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (ID) merupakan salah satu instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu **ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan**. Melalui IDM, pemerintah dapat memetakan status desa ke dalam kategori **sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri**.

Dalam kurun waktu perencanaan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas desa, memperkuat kelembagaan, serta



memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pendampingan pengelolaan keuangan desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kualitas aparatur desa.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kaitannya dengan IDM dapat ditunjukkan melalui peningkatan jumlah desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari tahun ke tahun. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian serta keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, antara lain :

- a. Kesenjangan kapasitas antar desa dalam memanfaatkan potensi lokal.
- b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengelola pembangunan desa.
- c. Perlunya penguatan integrasi program lintas sektor dalam mendukung dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.

Dengan memperhatikan capaian dan tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Fokus ke depan adalah mempercepat peningkatan status desa menuju desa maju dan mandiri secara berkelanjutan, sejalan dengan target pembangunan daerah serta agenda prioritas nasional dalam penguatan desa.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM tahun terakhir, status desa di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.5**  
**Persentase Staus Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Status Desa	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Mandiri	20	29,41	30	44,12	33	48,53
Maju	37	54,41	32	47,06	29	42,65
Berkembang	9	13,24	5	7,35	5	7,35



Tertinggal	2	2,94	1	1,47	1	1,47
------------	---	------	---	------	---	------

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa arah pembangunan desa di Kabupaten Sidenreng Rappang bergerak menuju perbaikan yang signifikan. Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal terus berkurang, sementara desa berkembang, maju, dan mandiri mengalami peningkatan.

Capaian ini menjadi bukti efektivitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong kemandirian desa. Namun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mempercepat peningkatan status desa ke arah desa mandiri.

## 2. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri Adalah desa dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi, yang menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan yang baik, serta mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan dengan kemandirian.

Persentase desa mandiri dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 jumlah desa dengan status mandiri sebanyak 4 dengan persentase sebesar 5,85% dan pada tahun 2021 jumlah desa mandiri mencapai 12 desa atau sebesar 17,65% selanjutnya di tahun 2022 pencapaian desa yang berstatus mandiri sebanyak 20 desa mandiri dengan persentase sebesar 29,41%. Tahun berikutnya 2023 mengalami peningkatan sebanyak 30 desa yang berstatus mandiri dengan persentase 41,12% begitu pula di tahun 2024 jumlah desa mandiri sebanyak 33 desa dari 68 jumlah keseluruhan desa atau sekitar 48,53 %. Persentase ini menggambarkan tingkat capaian kemandirian desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Semakin tinggi persentase desa mandiri, semakin baik pula kinerja pembangunan desa yang telah dilakukan. Adapun tabel capaian untuk Persentase Desa Mandiri berdasarkan status desa dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1.6**  
**Persentase Desa Mandiri**

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	5,85	17,65	29,41	44,12	48,53

Dalam beberapa tahun terakhir, persentase desa mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, seiring dengan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa telah berjalan pada jalur yang tepat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes, serta perbaikan akses layanan dasar. Namun capaian tersebut masih menghadapi tantangan, antara lain :

1. Masih terdapat kesenjangan antar desa dalam hal akses infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
2. Belum semua desa mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
3. Perlunya keberlanjutan pendampingan dan fasilitasi agar desa yang berkembang dan maju dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa mandiri.

Dengan demikian, peningkatan persentase desa mandiri menjadi salah satu target utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan ke depan.

### **3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator pembangunan yang digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dapat dinikmati secara setara antara laki-laki dan perempuan. IPG berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Capaian IPG Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan dari 92,06% pada tahun 2020 menjadi 92,20 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses,



partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Meskipun demikian, tantangan masih ada pada aspek ekonomi dan kepemimpinan Perempuan di tingkat desa/kelurahan, yang masih relative rendah. Untuk itu pencapaian Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.7**  
**Indeks Pembangunan Gender**

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,06	92,20	92,57	92,53	92,60

*Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang*

Berdasarkan tabel diatas maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan.

#### 4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk indikator ini belum ditetapkan (0%), sehingga tidak terdapat capaian yang dapat diukur pada periode tersebut. Target mulai ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 0,36% sesuai dengan penyesuaian perencanaan RPJMD 2025-2029.

Meskipun demikian, kecenderungan IKG Kabupaten Sidenreng Rappang relative stabil cenderung menurun, seiring dengan peningkatan akses Perempuan terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif. Secara umum perkembangan IKG Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbaikan menuju kondisi yang lebih setara, meskipun masih perlu Upaya serius untuk menekan ketimpangan gender terutama dalam partisipasi politik dan kesempatan kerja Perempuan.

#### 5. Indeks Perlindungan Anak

Tren data menunjukkan bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 60,37, namun Kembali turun pada tahun 2024 (58,6). Hal ini menandakan masih adanya tantangan seperti kesenjangan akses layanan Kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil



serta keterbatasan sumber daya dalam mendukung program perlindungan anak.

Secara umum capaian IPA Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode RPJMD 2020-2024 menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan serius. Meskipun ada capaian positif di tahun 2023, namun penurunan Kembali pada tahun 2024 menandakan perlunya strategi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menargetkan peningkatan IPA secara progresif melalui :

- Penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga desa/kelurahan.
- Peningkatan layanan perlindungan khusus anak dan pencegahan kekerasan.
- Peningkatan partisipasi anak dalam forum pembangunan.

## **6. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator yang baru digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak dapat dipenuhi, sekaligus menilai efektivitas perlindungan anak di daerah. IPHA dibangun dari 5 (lima) kluster yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuh, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta (5) perlindungan khusus.

Akan tetapi sebagai baseline capaian akhir tahun 2024 ditetapkan sebesar 62,45% dengan target peningkatan bertahap hingga 62,50% pada tahun 2029, sejalan dengan Upaya mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya.

### **d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki mandat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa serta urusan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kelompok sasaran yang menjadi focus intervensi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan



Perlindungan Anak mencakup berbagai unsur Masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan strategis ddalam RPJMD maupun tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan kepada kelompok sasaran berikut :

1. Masyarakat Desa

Masyarakat umum di perdesaan, khususnya kelompok miskin, rentan, dan marginal serta pelaku usaha desa, BUMDes dan unit usaha Masyarakat berbasis potensi lokal.

2. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Termasuk Pemerintah Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD), Lembaga kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang taruna, LPM dan Lainnya yang menjadi mitra strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berbasis Masyarakat, serta Lembaga adat dan kelembagaan social budaya desa.

3. Perempuan

Kelompok Perempuan, khususnya Perempuan kepala keluarga, Perempuan korban kekerasan serta Perempuan dalam situasi rentan ekonomi dan sosial. Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas, perlindungan hak, peemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap layanan.

4. Anak

- Anak usia dini hingga remaja, termasuk anak dalam situasi khusus (anak korban kekerasan, anak terlantar, anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan kasus hukum).
- Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi anak.
- Masyarakat dan keluarga sebagai pihak yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan haka nak.

5. Masyarakat Luas dan Stakeholder

- Organisasi Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat.
- Dunia Usaha (dalam kerangka CSR untuk pemberdayaan Masyarakat dan perlindungan anak).
- Perangkat daerah lain yang terkait dengan implementasi pengarusutamaan gender (PUG), perlindungan anak, dan pembangunan berbasis desa.

**e. Mitra Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang



bermitra dengan berbagai perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan program dan kegiatan, di antaranya :

1. Bapperida

Mitra dalam perencanaan pembangunan daerah, pengintegrasian isu gender dan perlindungan anak dalam dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD, Renstra)

2. Dinas Pendidikan

Dalam hal pemenuhan hak Pendidikan anak, sekolah ramah anak, peningkatan partisipasi pendidikan Perempuan, serta pelestarian budaya ramah gender.

3. Dinas Sosial

Melaksanakan perlindungan social perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta penanganan anak terlantar dan anak korban kekerasan.

4. Kecamatan dan Pemerintah Desa

Mitra strategi dalam pemberdayaan Masyarakat, penguatan kelembagaan desa ramah Perempuan dan peduli anak, serta pelaksanaan forum anak desa.

5. Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri

Melaksanakan perlindungan hukum, penanganan kasus kekerasan Perempuan dan anak, serta akses keadilan

6. Lembaga non pemerintah dan Masyarakat

Forum anak, PKK, Organisasi Perempuan, LSM, dan dunia usaha sebagai mitra pendukung pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan yang masih dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Kapasitas aparatur pemerintahan desa belum merata, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan partisipatif, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Pengelolaan BUMDes belum optimal, sebagian masih menghadapi kendala manajemen, akses permodalan, dan keterhubungan dengan pasar.

3. Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW) belum seluruhnya berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat.



4. Tingkat partisipasi masyarakat desa, terutama perempuan, pemuda, dan kelompok marginal, dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih terbatas.
5. Layanan perlindungan perempuan dan anak belum terintegrasi optimal, baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan.
6. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah.

#### **b. Isu Strategis**

Selain permasalahan internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang juga dihadapkan pada isu strategis eksternal yang mempengaruhi arah kebijakan ke depan, yaitu :

##### **Isu Positif (+) :**

1. Meningkatnya jumlah desa mandiri (dari 17,65% di tahun 2020 menjadi 48,53% di tahun 2024) yang menjadi peluang untuk memperkuat pembangunan berbasis desa.
2. Dukungan regulasi nasional (UU Desa, Permendesa tentang Dana Desa, RPJMN, dan SDGs Desa) yang memperkuat peran desa dalam pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta penguatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
4. Berkembangnya teknologi digital yang membuka peluang digitalisasi tata kelola desa, BUMDes, serta sistem layanan perlindungan perempuan dan anak.

##### **Isu Negatif (-) :**

1. Ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih adanya praktik perkawinan usia dini.
3. Masih terdapat desa tertinggal dan berkembang yang membutuhkan percepatan pembangunan.
4. Perubahan regulasi dan kebijakan pusat yang dinamis, sehingga membutuhkan adaptasi cepat di tingkat daerah.
5. Masih terbatasnya ruang fiskal daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, dan perlindungan perempuan serta anak.



**Tabel. 2.2.2**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Potensi Desa Mandiri 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 3. Kelembagaan Sosial dan Adat Desa 4. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 5. Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Forum Anak 6. Gerakan dan Inovasi Lokal	1. Masih adanya desa yang belum mencapai status mandiri 2. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal 3. Masih lemahnya partisipasi Masyarakat 4. BUMDes belum berkembang optimal 5. Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak 6. Masih rendahnya pemenuhan hak anak 7. Minimnya kelembagaan perlindungan Perempuan dan anak di Tingkat desa	1. Masih terbatasnya inovasi desa ramah lingkungan dan pengelolaan SDA berbasis Masyarakat 2. Memudarnya nilai gotong royong, solidaritas, dan kelembagaan sosial Masyarakat desa 3. Keterbatasan akses kelompok Perempuan dan anak pada sumber daya ekonomi dan pengambilan Keputusan 4. Masih adanya persoalan stunting, pernikahan usia anak	1. Perubahan Iklim 2. Pembangunan Berkelanjutan 3. Kemajuan Teknologi	1. Pemanfaatan Bonus Demografi 2. Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Pendapatan 3. Prevalensi Stunting	1. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 2. Konektivitas Eilayah 3. Hirilisasi Komoditas Unggulan 4. Swasembada Pangan, Air, dan Energi	1. Peningkatan kapasitas desa dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan 2. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan tata Kelola yang akuntabel 3. Bagaimana meningkatkan kualitas dan efektivitas musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan agar lebih partisipatif, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat



		<p>5. Desa perlu diarahkan menjadi Desa Ramah Anak dan Desa Sehat yang mendukung lingkungan hidup</p> <p>6. Potensi BUMDes untuk mengembangkan usaha berbasis ramah lingkungan</p> <p>7. Keterbatasan akses modal dan teknologi ramah lingkungan di Tingkat desa</p>				<p>4. Bagaimana memperkuat kelembagaan dan kapasitas usaha BUMDes agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan</p>
--	--	--	--	--	--	--



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian dari Upaya mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan pemberdayaan Masyarakat, desa yang mandiri, serta pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa;
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode 2025-2029 yaitu :

2. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah desa yang berstatus mandiri;
2. Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan
3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.

Agar lebih jelas, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000 – DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0.8060	0.8062	0.8064	0.8066	0.8068	0.8070	0.8072	
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Meningkatnya jumlah desa yang berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	48.53	51.47	54.51	57.35	60.29	63.23	86.17	
		Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C	CC	CC	CC	CC	B	B	
	Meningkatnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.53	92.73	92.93	93	93.01	93.1	93.2	
Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	
			Indeks Perlindungan Anak	71.66	73.49	74.01	74.5	74.7	74.9	75.0	



### 3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategis merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan Pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasrab Pembangunan yang akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strtategi.

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan



penyanggandisabilitas)	penyanggandisabilitas)	penyanggandisabilitas)	penyanggandisabilitas)	penyanggandisabilitas)
Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dalam mendukung Pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

**Tabel 3.3**  
**Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA</b>	<b>KET.</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa</li> <li>- Meningkatnya jumlah desa yang berstatus mandiri</li> </ul>	Penyusunan basis data terpadu Masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan social dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, pengendalian inflasi daerah, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang bedaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan system informasi desa dan data terpadu keluarga miskin, Perempuan, anak, dan kelompok marginal</li> <li>- Mengoptimalkan peran desa dalam penyaluran bantuan sosial.</li> <li>- Meningkatkan kapasitas apparatus desa dan kader Masyarakat dalam mengelola layanan dasar.</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan ekonomi desa berbasis potensi lokal.</li> <li>- Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk desa.</li> <li>- Meningkatkan daya saing produk unggulan UMKM berbasis potensi lokal.</li> </ul>	
Meningkatnya pemberdayaan dan	Penguatan kerangka regulasi daerah, perncegahan	- Mewujudkan penguatan kerangka regulasi	



<p>perlindungan terhadap Perempuan dan anak</p>	<p>perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial</p>	<p>daerah bidang pemberdayaan Masyarakat, desa, Perempuan dan perlindungan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan angka perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender</li> <li>- Meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan Masyarakat desa melalui program ekonomi produktif</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur publik yang ramah Perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan</li> <li>- Meningkatkan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial</li> </ul>	
<p>Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, optimalisasi system pengaduan Masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemanfaatan penerapan SOP pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perangkat daerah</p>	



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, kegiatan dan Subkegiatan**

Didalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu rencana berupa program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program merupakan sarana yang penting bagi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan isu-isu strategi, kewenangan perangkat daerah, dan ketersediaan sumber daya. Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta berorientasi pada hasil. Teknis merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Program Perangkat Daerah**

BIDANG URUSAN / ROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					126.000.000,00		131.960.000,00		138.226.000,00		143.905.000,00		149.897.000,00	
2.08.02 – PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					40.000.000,00		45.100.000,00		50.301.000,00		55.303.000,00		60.406.000,00	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	100	100	100	40.000.000,00	100	45.100.000,00	100	50.301.000,00	100	55.303.000,00	100	60.406.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 – PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					15.000.000,00		15.150.000,00		15.300.000,00		15.453.000,00		15.609.000,00	
Terpenuhinya Hak- Hak Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Melalui Layanan Perlindungan yang Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	0	0.001	15.000.000,00	0.001	15.150.000,00	0.001	15.300.000,00	0.001	15.453.000,00	0.001	15.609.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					26.000.000,00		26.260.000,00		26.622.000,00		26.787.000,00		27.055.000,00	



BIDANG URUSAN / ROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga (%)	100	100	100	26.000.000,00	100	26.260.000,00	100	26.622.000,00	100	26.787.000,00	100	27.055.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					30.000.000,00		30.300.000,00		30.703.000,00		30.909.000,00		31.218.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62.45	62.45	62.45	30.000.000,00	62.45	30.300.000,00	62.50	30.703.000,00	62.50	30.909.000,00	62.50	31.218.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					15.000.000,00		15.150.000,00		15.300.000,00		15.453.000,00		15.609.000,00	
Terpenuhinya Hak Perlindungan Khusus Bagi Anak Melalui Layanan yang Responsif dan Adil	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.150.000,00	100	15.300.000,00	100	15.453.000,00	100	15.609.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.126.720.000,00		3.168.362.350,00		3.210.888.759,00		3.225.214.646,00		3.229.325.115,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG					2.962.699.000,00		2.993.016.350,00		3.044.940.759,00		3.056.064.646,00		3.071.203.115,00	



BIDANG URUSAN / ROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.962.699.000,00	100	2.993.016.350,00	100	3.044.940.759,00	100	3.056.064.646,00	100	3.071.203.115,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		36.000.000,00		32.000.000,00	
Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0	0	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	36.000.000,00	100	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					6.770.000,00		6.838.000,00		6.906.000,00		7.000.000,00		7.930.000,00	
Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa (%)	100	100	100	6.770.000,00	100	6.838.000,00	100	6.906.000,00	100	7.000.000,00	100	7.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					55.628.000,00		67.184.000,00		56.846.000,00		67.813.000,00		57.112.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan,	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)				55.628.000,00		67.184.000,00		56.846.000,00		67.813.000,00		57.112.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan



BIDANG URUSAN / ROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Akuntabel, dan Partisipatif														Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					61.623.000,00		61.324.000,00		62.196.000,00		58.337.000,00		61.080.000,00	
Meningkatnya Peran dan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	61.623.000,00	100	61.324.000,00	100	62.196.000,00	100	58.337.000,00	100	61.080.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>3.252.720.000,00</b>		<b>3.300.322.350,00</b>		<b>3.349.114.759,00</b>		<b>3.369.119.646,00</b>		<b>3.379.222.115,00</b>	



Tagel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
					Indeks Desa Membangun (IDM)			
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)			
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
					Terbentuknya Pokja PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	jumlah SDM lembaga masyarakat dan Perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	jumlah SDM Lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.02.0008 – Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan						



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan Dan pengembangan lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Melalui Layanan Perlindungan yang Komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Persentase kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase kasus kekerasan yang berhasil dirujuk dan ditangani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau penjangkauan bagi perempuan Korban kekerasan Tingkat kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan	2.08.03.2.03.0008-Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perempuan yang mendapatkan bimtek	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 – PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Persentase lembaga yang menerapkan kebijakan PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase penguatan dan pengembangan lembaga yang dilaksanakan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan & pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008 – monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Hak Perlindungan Khusus Bagi		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Anak Melalui Layanan yang Responsif dan Adil	Persentase pencegahan kekerasan yang dilakukan terhadap anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0010 – monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif		Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga ewenangan Kabupaten/kota	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kotaten/ kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
				Jumlah sosialisasi dan edukasi terkait kesetaraan gender dan hak anak	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0004 – monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Desa yang Berstatus Mandiri			Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan		Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Jumlah Kerja Sama Desa yang Terasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Des	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Des	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Des	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Desa yang ifasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Peran dan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Akti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Des	2.13.05.2.01.0008 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Des	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal		Persentase Fasilitas Penataan Des	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Persentase Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Des	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Dukungan	Predikat Nilai SAKIP		
					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.13.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (outcome)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	89.77	100	40.000.000	100	45.100.000	100	50.301.000	100	55.3030.000	100	60.406.000		
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Terbentuknya Pokja PUG	-	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.301.000	1	10.303.000	1	10.406.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>2.08.02.2.01.0007</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota		-												
Terlaksananya hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG (output)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota		1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.301.000	1	10.303.000	1	10.406.000		
<b>2.08.02.2.02</b> <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70	30.00	15.000.000	30.00	15.000.000	30.00	15.000.000	30.00	15.000.000	30.00	15.000.000		
<b>2.08.02.2.02.0008</b> Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	70	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
<b>2.08.02.2.03</b> <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
	<b>Persentase partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan</b>	-	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000		
<b>2.08.02.2.03.007</b> Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (ouput)	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	-	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000		
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>														
Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Melalui Layanan Perlindungan yang Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.004	0.001	15.000.000	0.001	15.150.000	0.001	15.300.000	0.001	15.453.000	0.001	15.609.000		
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota														
	<u>Persentase Kekerasan</u>		100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.100.000	100	5.151.000	100	5.203.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<u>terhadap Perempuan yang ditangani</u>													
<b>2.08.03.2.01.0003</b> Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.100.000	1	5.151.000	1	5.203.000		
<b>2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
Terpenuhinya pelayanan kasus kekerasan (ouput)	<u>Persentase kasus kekerasan yang berhasil dirujuk dan ditangani</u>		100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.100.000	100	5.151.000	100	5.203.000		
<b>2.08.03.2.02.0008</b> Layanan Pengaduan atau Penjangkauan														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota														
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (output)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.100.000	5	5.151.000	5	5.203.000		
<b>2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>														
	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif		2	5.000.000	2	5.050.000	2	5.100.000	2	5.151.000	2	5.203.000		
<b>2.08.03.2.03.0008</b> Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek		5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.100.000	5	5.151.000	5	5.203.000		
<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>														
Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif (oucome)	Persentase keluarga dan Lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	100	100	26.000.000	100	26.260.000	100	26.622.000	100	26.787.000	100	27.055.000		
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	50	52	20.000.000	53	20.200.000	55	20.502.000	60	20.606.000	61	20.812.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>2.08.04.2.01.0006</b> Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kotaten/ kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.														
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota (output)	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29	100	20.000.000	100	20.200.000	100	20.502.000	100	20.606.000	100	20.812.000		
<b>2.08.04.2.02</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
	Jumlah sosialisasi dan edukasi terkait kesetaraan gender dan hak anak	-	1	6.000.000	1	6.060.000	1	6.120.000	1	6.181.000	1	6.243.000		
<b>2.08.04.2.02.0004</b> Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	6.000.000	1	6.060.000	1	6.120.000	1	6.181.000	1	6.243.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>														
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster (Outcome)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62.45	62.45	30.000.000	62.45	30.300.000	62.5	30.703.000	62.5	30.909.000	62.5	31.218.000		
<b>2.08.06.2.01</b> Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Persentase Lembaga menerapkan kebijakan PHA	100	100	20.000.000	100	20.200.000	100	20.502.000	100	20.606.000	100	20.812.000		
<b>2.08.06.2.01.0003</b> Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	20.000.000	2	20.200.000	2	20.502.000	2	20.606.000	2	20.812.000	
<b>2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													
	<b>Persentase penguatan dan pengembangan lembaga yang dilaksanakan</b>	-	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.000	100	10.406.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (output)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.000	1	10.406.000		
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>														
Terpenuhinya Hak Perlindungan Khusus Bagi Anak Melalui Layanan yang Responsif dan Adil	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan	100	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.300.000	100	15.453.000	100	15.609.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Layanan Komprehensif													
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
	Persentase pencegahan kekerasan yang dilakukan terhadap anak	-	100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.10.000	100	5.151.000	100	5.203.000		
2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (output)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.10.000	5	5.151.000	5	5.203.000		
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (output)	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.10.000	100	5.151.000	100	5.203.000		
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (output)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.10.000	5	5.151.000	5	5.203.000		
2.08.07.2.03 Penguata n dan Pengembangan														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.10.000	1	5.151.000	1	5.203.000		
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga	-	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.10.000	1	5.151.000	1	5.203.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (output)	penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>														
<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (outcome)	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.962.699.000	100	2.993.016.350	100	3.044.940.759	100	3.056.064.646	100	3.071.203.115		
<b>2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen	100	100	12.564.000	100	12.595.000	100	12.626.000	100	12.657.000	100	12.688.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja													
<b>2.13.01.2.01.0001</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000		
<b>2.13.01.2.01.0002</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (output)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
<b>2.13.01.2.01.0003</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (output)	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD													
<b>2.13.01.2.01.0004</b> Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (output)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
<b>2.13.01.2.01.0005</b> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Perubahan DPA-SKPD													
<b>2.13.01.2.01.0006</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (output)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	3.064.000	2	3.095.000	2	3.126.000	2	3.157.000	2	3.188.000		
<b>2.13.01.2.02 Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.568.720.000	100	2.617.322.3 50	100	2.667.114.75 9	100	2.687.119.646	100	2.697.222.115		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>2.13.01.2.02.0001</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (output)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	300	2.563.720.000	300	2.611.322.350	300	2.660.114.759	300	2.680.119.646	300	2.690.222.115		
<b>2.13.01.2.02.0007</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (output)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	60	20	5.000.000	20	6.000.000	20	7.000.000	20	7.000.000	20	7.000.000		
<b>2.13.01.2.06 Administ rasi Umum Perangkat Daerah</b>														
	<b>Persentase Fasilitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80.665.000</b>	<b>100</b>	<b>73.010.000</b>	<b>100</b>	<b>73.950.000</b>	<b>100</b>	<b>72.038.000</b>	<b>100</b>	<b>72.043.000</b>		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
<b>2.13.01.2.06.0001</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (output)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3	1.300.000	3	1.010.000	3	1.520.000	3	1.038.000	3	1.043.000		
<b>2.13.01.2.06.0002</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (output)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.365.000	1	1.000.000	1	1.430.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
<b>2.13.01.2.06.0009</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	145	145	78.000.000	145	71.000.00	145	71.000.000	145	70.000.000	145	70.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (output)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
<b>2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
Terpenuhinya barang milik daerah (output)	Persenatase Pengadaan Barang Milik Daerah	-	100	33.000.000	100	21.500.000	100	23.500.000	100	16.500.000	100	21.500.000		
<b>2.13.01.2.07.0002</b> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (output)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	3	16.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
<b>2.13.01.2.07.0005</b> Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel (output)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2	2.000.000	1	1.500.000	1	2.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
<b>2.13.01.2.07.0006</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	-	3	15.000.000	3	15.000.000	3	16.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(output)	Mesin Lainnya yang Disediakan													
<b>2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>191.000.000</b>	<b>100</b>	<b>191.839.000</b>	<b>100</b>	<b>191.000.000</b>	<b>100</b>	<b>191.000.000</b>	<b>100</b>	<b>191.000.000</b>		
<b>2.13.01.2.08.0002</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (output)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000		
<b>2.13.01.2.08.0004</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (output)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	149.000.000	12	149.839.000	12	149.000.000	12	149.000.000	12	149.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	76.750.000	100	76.750.000	100	76.750.000	100	76.750.000	100	76.750.000		
2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (output)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000		
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	3	5	1.750.000	5	1.750.000	5	1.750.000	5	1.750.000	5	1.750.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara													
<b>2.13.01.2.09.0009</b>														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (output)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>														
Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal (outcome)	Persentase Fasilitas Penataan Desa	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	36.000.000	100	32.000.000		
<b>2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa</b>														
Terlaksananya penataan desa (output)	Persentase Penataan Desa	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	36.000.000	100	32.000.000		
<b>2.13.02.2.01.0001</b>														
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.000.000	1	16.000.000	
<b>2.13.02.2.01.0004</b> Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa (output)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.000.000	1	16.000.000	
<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>													
Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (outcome)	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	100	100	6.770.000	100	6.838.000	100	6.906.000	100	7.000.000	100	7.930.000	
<b>2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>													
Terlaksananya fasilitasi kerja sama desa (output)	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	5	10 Desa	6.770.000	11 Desa	6.838.000	12 Desa	6.906.000	12 Desa	7.000.000	13 Desa	7.930.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan														
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (output)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	4	6.770.000	5	6.838.000	6	6.906.000	7	7.000.000	8	7.930.000		
<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif (oucome)	Persentase Fasilitas Tatakelola Desa	100	100	55.628.000	100	67.184.000	100	56.846.000	100	67.813.000	100	57.112.000		
2.13.04.2.01 Pembina an dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa (output)	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	55.628.000	100	67.184.000	100	56.846.000	100	67.813.000	100	57.112.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>2.13.04.2.01.0004</b> Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa														
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68	68	15.000.000	68	15.150.000	68	15.301.000	68	15.454.000	68	15.609.000		
<b>2.13.04.2.01.0008</b> Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68	68	15.000.000	68	15.150.000	68	15.301.000	68	15.454.000	68	15.609.000		
<b>2.13.04.2.01.0009</b> Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa														
Terseleenggarakannya Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian	-	-	0	38	11.000.000	-	0	13	10.500.000	-	0		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	dan Pemberhentian Kepala Desa													
<b>2.13.04.2.01.0011</b> Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	23	68	6.586.000	68	6.652.000	68	6.719.000	68	6.786.000	68	6.854.000		
<b>2.13.04.2.01.0013</b> Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68	68	12.531.000	68	12.656.000	68	12.783.000	68	12.911.000	68	13.040.000		
<b>2.13.04.2.01.0015</b> Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0	15	6.511.000	15	6.576.000	15	6.642.000	15	6.708.000	8	6.000.000		
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,</b>														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya Peran dan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya Desa (outcome)	Persentase Lembaga Kemaasyarakatan yang Mampu meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Kemasyarakatan	100	100	61.623.000	100	61.324.000	100	62.196.000	100	58.337.000	100	61.080.000		
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Lembaga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	100	100	61.623.000	100	61.324.000	100	62.196.000	100	58.337.000	100	61.080.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
kemasyarakatan desa yang aktif (output)	n Desa/Kelurahan yang aktif													
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (output)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	17	17	400.000	18	3.500.000	18	3.570.000	18	3.606.000	18	3.642.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	dan Masyarakat Hukum Adat													
<b>2.13.05.2.01.0003</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (output)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan & Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	81	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	79	14.000.000	79	14.000.000		
<b>2.13.05.2.01.0004</b> Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan														



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (output)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan & Masyarakat Hukum Adat	20	20	13.000.000	30	13.130.000	40	13.361.000	50	13.393.000	50	13.527.000		
<b>2.13.05.2.01.0006</b> Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	20	20	7.123.000	30	7.194.000	40	7.265.000	50	7.338.000	50	7.411.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(output)	Teknologi Tepat Guna													
<b>2.13.05.2.01.0008</b> Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (output)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggara an Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	13	13	2.250.000	13	2.250.000	13	3.000.000	-	0	13	2.250.000		
<b>2.13.05.2.01.0009</b> Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa	106	106	20.000.000	106	20.000.000	106	20.000.000	106	20.000.000	106	20.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (output)	n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													



Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mengurai daftar Kegiatan dan Subkegiatan prioritas pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	<b>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran dan kemandirian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan sosial dan budaya desa	<b>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	



			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pembangunan daerah	<b>2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b> 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota <b>2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi <b>2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	
4	Program Perlindungan Perempuan	Terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan dan TPPO melalui layanan perlindungan yang komprehensif	<b>2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b> 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	



			<p><b>2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b> 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota</p> <p><b>2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> P2.08.03.2.03.0002 peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota</p>	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Terpenuhinya hak perlindungan khusus bagi anak melalui layanan yang responsif dan adil	<p><b>2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b> 2.08.07.2.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota</p> <p><b>2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK</p> <p><b>2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan Pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan indikator ini sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program Pembangunan daerah. Indikator tersebut menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai pencapaian kinerja Pembangunan daerah. Didalam perencanaan Pembangunan Daerah indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan, serta program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan asasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasara RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja Pembangunan.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.8062	0.8064	0.8066	0.8068	0.8070	0.8072	
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	51,47	54,51	57,35	60,29	63,23	86,17	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.73	92.93	93	93.01	93.1	93.2	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	



5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,49	74,01	74,5	74,7	74,9	75	
---	--------------------------------	--------	-------	-------	------	------	------	----	--

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya dikemukakan pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
3	Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	62.45	62.45	62.45	62.5	62.5	62.5	
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	-	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	-	100	100	100	100	100	
8	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Fasilitasi Tatakelola Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman, arah, dan instrumen pengendalian bagi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kondisi daerah, isu strategis, arah kebijakan RPJMD, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Pelaksanaannya akan senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.

Sejalan dengan amanat RPJMD, pelaksanaan Renstra ini akan dikendalikan dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi komitmen bersama untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih maju, mandiri, sejahtera, inklusif, serta berkelanjutan.

Pangkajene Sidenreng,      September 2025

Kepala Dinas PMDPPA,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP  
NIP. 196512311987111013







